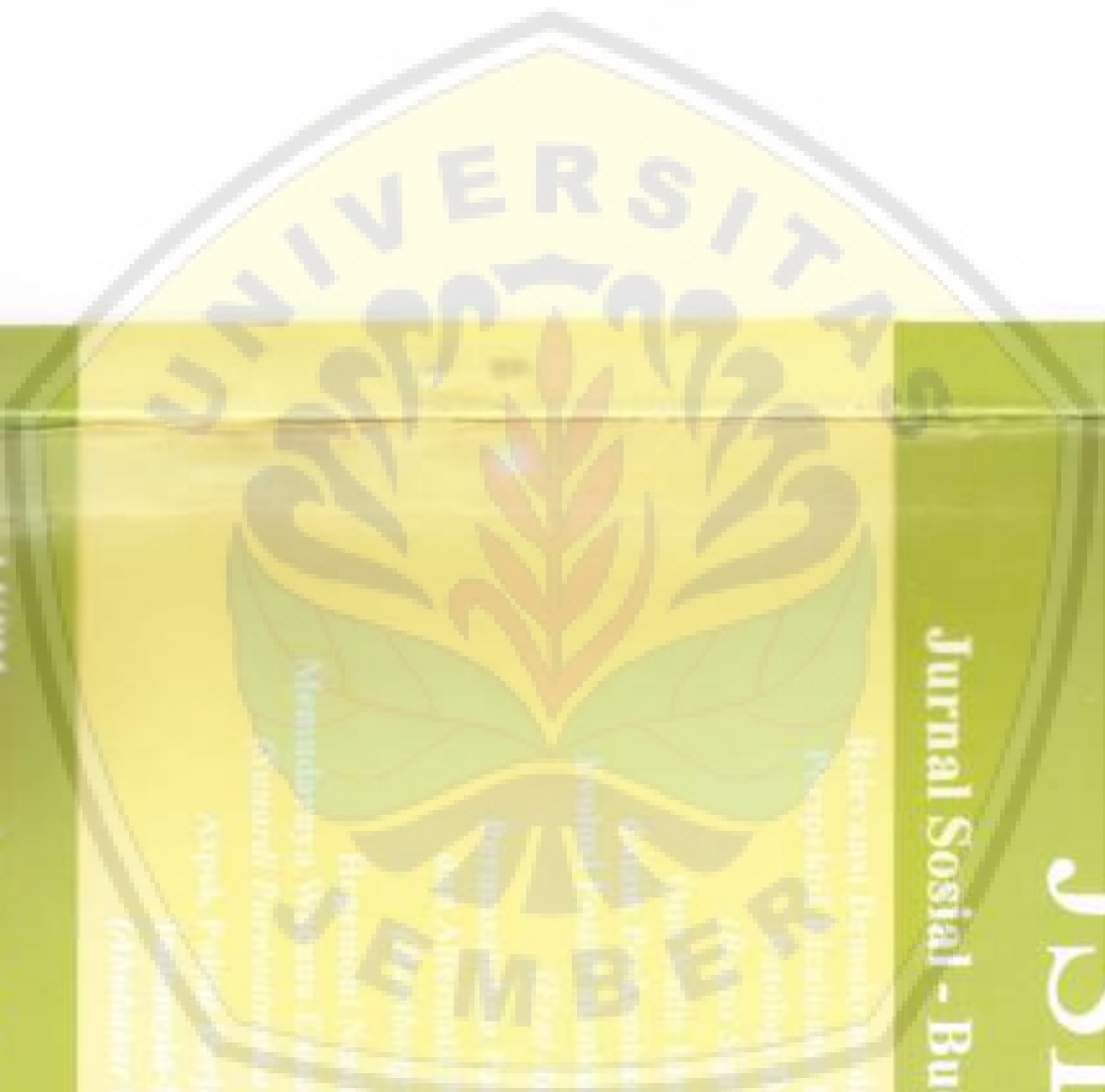


JSBP

Jurnal Sosial - Budaya dan Politik



Keberhasilan Permodalan dan Perindustrian dalam
Mengembangkan Masyarakat Melalui Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Analisis Kebijakan dan Strategi Gender
dalam Program Pengembangan Perikanan
Kecamatan Gunungkidul, Kawasan Perikanan
Kendal, Semarang

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monev Rencana
Operasional dan Anggaran Kemahasiswaan
Universitas Jember

Memorandum MoU antara Universitas Indonesia
dan Universitas Jember

Aspek Pendidikan, Penelitian, Ekstrakurikuler
dan Pengembangan Singaperbangsa
(Universitas Negeri Jember)

LKPM

Laboratorium Kajian Pemberdayaan Masyarakat

LKPN

Laboratorium Kajian Politik dan Kawasan

FTSIP Universitas Jember

Penyunting
 Ketua Penyunting
 Peng Pelaksana

- : Abubakar Eby Hara
- : Akhmad Ganefo
- : Agus Trihartono
- Budhy Santoso
- Himawan Bayu Parradi
- Kris Hendrianto
- M. Affandi
- Maulana Surya Kusumah
- Muhammad Iqbal
- Sunardi Purwoatmoko
- : A. Latief Wiyata (*Universitas Jember*)
- Akhmad Khusyairi (*Universitas Jember*)
- Ayu Sutarto (*Universitas Jember*)
- Bustani Rahman (*Universitas Jember*)
- Hary Yusuf (*Universitas Jember*)
- Heru Nugroho (*Universitas Gadjah Mada*)
- Huub de Jonge (*Nijmegen University*)
- Mohtar Mas'ood (*Universitas Gadjah Mada*)
- Robert Wessing (*Leiden University*)
- Setya Yuwana (*Universitas Negeri Surabaya*)
- Sunoyo Usman (*Universitas Gadjah Mada*)
- : Bagus Sigit Sunarko
- Hudan Ikhsan

...ial-Budaya dan Politik (JSBP) diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun sejak
 2001). Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam
 ...an. Naskah diketik di atas kertas HVS kwarto spasi ganda sepanjang lebih kurang 20
 ...t, dengan format seperti rencanum dalam halaman kulit dalam-belakang (Persyaratan
 ...ah untuk JSBP). Naskah yang diterima penyunting, dievaluasi dan disunting untuk
 keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya.

...ertanggung (termasuk ongkos kirim) Alamat Penyunting dan Tata Usaha
 ...ap tahun (dua kali penerbitan):

Pulau Jawa	Luar Jawa	LKPM-LKPK FTSP Universitas Jember Jl.
Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-	Kalimantan, Kampus Tegal Boto, Jember
Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-	68131, Telp. & Fax. (031) 335586 E-mail:
Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	jsbp@eudoranal.com, ebyhara@yahoo.com

...va bertanggung dapat ditransfer ke Bank Mandiri No. Rekening: 1430001261997
 ...ntax nama Abubakar Eby Hara

Daftar Isi

Relevansi Demokrasi dan Perdamaian dalam Perspektif Idealisme:
 Identifikasi Terhadap Patologi Demokrasi
 (Bagus Sigit Sunarko) 451-460

Quo Vadis Ideologi Gender dalam Perkembangan Peradaban:
 Evolusi Positif ataukah Kontra Produktif?
 (Erni Agustini) 461-471

Permasalahan Pada Masa Remaja dan
 Alternatif Pemecahannya
 (Bambang Winarko) 473-483

Hegemoni Neoliberalisme dan Memudarnya Wacana Ekonomi
 Alternatif di Indonesia
 (Sunardi Purwoatmoko dan Agus Trihartono) 485-508

Aspek Politik Perjanjian Ekstradisi
 Indonesia-Singapura
 (Abubakar Eby Hara) 509-514

Aspek Politis Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Oleh: Abubakar Eby Hara¹

Abstract: Many people blame Singapore for the failure to make an agreement with Indonesia on extradition law. However, in this paper, the author argues that part of the problem actually lay on Indonesian side. Some officials in the past did not want the agreement to come into reality because they were afraid that the extradited person would uncover some corruption case that might involved him or her in one or two cases of corruption. Another problem in Indonesian side was that the weak law enforcement in Indonesia itself. Weak law enforcement allows the corrupt businessmen to run away leaving this country. Therefore we now need a seriousness of both parties to pursue an agreement. We expect Indonesia can go on to enforce law and Singapore welcomes meetings and dialog to discuss extradition issues.

Keywords: hubungan Singapura-Indonesia, ekstradisi, penegakan hukum, korupsi dan pengusaha

1. Pendahuluan

Paper ini ditulis oleh seorang awam yang tidak tahu sama sekali tentang masalah ekstradisi. Panitia menghubungkan penulis akhirnya karena memungkinkan ada wakil dari jurusan HI Univ Jember sebagai tuan rumah dan meminta pemrasaran untuk mengkaji aspek politis masalah ekstradisi. Namun tetap saja ini bukan bidang kajian yang

diketahui penulis dengan baik. Karena itu, kami mohon dimaafkan bahwa tulisan ini sangat lemah dengan fakta dan kelemahan-kelemahan lainnya.

Proses perundingan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dimulai pada awal tahun ini. Perundingan ini bisa berjalan setelah dipicu oleh kontradiksi panjang tentang

Association of Southeast Asian Studies, *The Conference on Economic Crisis in Southeast Asia and Korea : Its Social, Cultural and Political Impacts*, February 2000, Bangkok.

Kompas, 8 April 2000.

Koran Tempo, 27 mei 2003.

Kompas, 26 Januari 2003.

Koran, No. 36, Tahun VII, 9 Juni 2003.

Mohar Mas'ud, *Babun Kariah Ekonomi Politik Internasional, Hubungan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 1998.

Mas'ud, Adhie M., (2000), 'MIB Internasional Indonesia Baru', *Tabulha*, 18 Januari.

Media Indonesia, 14 Januari 2000.

Media Indonesia, 7 Februari 2000.

Peter G. Warr, "Case Studies: The Troubled Economies of Thailand", Ross H. McLeod and Ross Garnaut (eds), *East Asia in Crisis from being a Miracle to a Needing* '97, Routledge, London, 1998.

Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, Princeton

University Press, Princeton, New Jersey, 1986.

Ross H McLeod, "Case Studies: The Troubled Economies of Indonesia", in Ross H. McLeod and Ross Garnaut (eds), *East Asia in Crisis From being a Miracle to a Needing One* '7, Routledge, London, 1998.

Rachman, M. Fadriol, (2000), 'Negara Kebangsaan Proyek yang tak Pernah Selesai', *Kompas*, 17 Januari

Sung-Yeal Koo, "Source of the Asian Currency Crisis: Internal and External", in The Association of Southeast Asian Studies, *The Conference on Economic Crisis in Southeast Asia and Korea: Its Social, Cultural and Political Impacts*, February 2000, Bangkok.

Sutaryono, Paul dan Ananta, T. Bih (2003), 'Sisa-sisa Pelajaran Privatisasi', *Suara Karya*, 2003.

Sulasitono, (2000), 'Otonomi, Federal, atau Merdeka', *Kompas*, 11 Januari.

Sunaryo, Thomas, (2000), 'Pengaruh, Separatisme, dan Federalisme', *Kompas*, 13 Januari.

Suara Karya, 5 Juni 2003

The Jakarta Post, 28 Mei 2003

¹ Dosen Fisip Universitas Jember.

keinginan Indonesia agar beberapa pengusaha bisnis Indonesia yang melarikan diri ke Singapura segera dikestradisi ke Indonesia dan keinginan Singapura agar para tersangka teroris di Indonesia dikestradisi ke Singapura. Tujuan Singapura agar dilakukan kestradisi tersangka pelaku terror itu telah menimbulkan protes di kalangan elite di Jakarta. Beberapa anggota DPR dan Menteri Kehakiman dan HAM serta itu menuduh Singapura mau mengorbankan diri dengan meminta ekstradisi penjahat dari Indonesia namun melindungi para penjahat Indonesia yang berserunya di negara ini.

Dari berbagai berita dan tulisan, kita memperoleh kesan bahwa Singapura sengaja menunda perundingan peninjauan ekstradisi ini karena mereka memperoleh keuntungan dari larinya para konglomerat bisnis ke negeri mereka. Para konglomerat itu yang umumnya adalah keturunan Cina mahasiswa serta uang hasil usaha mereka dan menyimpannya di bank-bank Singapura. Mereka bebas berkeluaran di sini. Kalau dalam istilah terorisme, Indonesia dikenal sebagai *hub* dan *honor* untuk para teroris maka Singapura adalah *honor* atau pusat (*hub*) untuk para konglomerat bisnis.

Kita juga dapat berspekulasi Singapura sengaja melindungi para konglomerat Cina ini karena sentimen kepentingan negeri mayoritas Cina itu untuk melindungi sesama orang perantau Cina di kawasan ini. Kita juga dapat berspekulasi bahwa negeri itu ternyata telah melecehkan Indonesia. Negeri itu ketika berhadapan dengan Indonesia tidak perlu mengabarkan

penting transparansi dan sikap anti korupsi, satu kontrak dengan citranya sebagai negeri yang bersih dan tidak korup di dunia internasional. Tidak mengherankan bahwa kesan demikian kemudian memunculkan komentar keras dari Presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid ketika mereka berkuasa. Habibie misalnya mengesankan Singapura sebagai republik pulau kecil seperti "tiny red dot on the map". Habibie memarah Singapura sebagai negara rasial. Menurut dia, di Singapura orang Melayu tidak pernah bisa menjadi perwira (Cruet 2004). Gus Dur, mengesankan Singapura sebagai negara yang memertekkan etnis Melayu dan negara itu hanya ingin mendapat keuntungan dari tetangganya yang miskin (England 2000).

Namun sebuah kajian yang lebih dalam akan menunjukkan bahwa sentosa kesan dan spekulasi di atas perlu dipertanyakan dalam proporsinya. Pertama Singapura tentu saja dipengaruhi kepentingan domestik dari negara kecil itu untuk memperbaiki kelangsungan hidupnya. Kita dapat berspekulasi tentang keuntungan ekonomi, rasisme, perlakuan tidak adil dan arogansi Singapura terhadap kepentingan tetangga. Tetapi itu semua mungkin terjadi karena kondisi kondisi yang ada pada Indonesia juga. Kondisi itu sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut menyuguhkan kejiwaan dan kondisi penegakan hukum di Indonesia sendiri.

2. Kepentingan Domestik Singapura

Sering disebutkan bahwa salah satu ciri hubungan antar bangsa adalah bahwa setiap negara adalah *selfish* yakni mengejar kepentingan dirinya sendiri

lampa menghiraukan kepentingan negara lain. Namun belakangan ini asumsi itu dianggap bukannya sesuatu yang datang dengan sendirinya melainkan lahir melalui proses sosial tertentu. Bagi Singapura ciri itu agaknya berasal dari perjalanan historis yang pahit, kenyataan geografis dan kondisi demografis masyarakat.

Pengalaman historis itu berkaitan dengan kenyataan bahwa mereka harus berdiri sendiri dan terpisah dari Federasi Melayu. Sebagai negara kecil tanpa sumber alam tentu saja sulit untuk membangun negara itu bisa *survive* tanpa suatu disiplin yang tinggi dan kerja keras. Apalagi sebagian besar penduduk Singapura adalah para perantau keturunan Cina yang terpisah jauh dari tempat asal usulnya. Penekanan pada keetnisan dan budaya Cina seringkali membuat para tetangga terasingkan dan membaringkakan sentimen anti Cina (Leifer 2000). Mereka terkecung oleh tetangga Melayu yang dominan di Asia Tenggara.

Tiga kondisi di atas: kenyataan historis, geografis dan demografis dengan *playa* telah dijadikan bahan kampanye oleh para pemimpin Singapura untuk mendorong rakyat mereka mempertahankan negaranya yang kecil dan tidak punya sumber alam. Singapura harus mengkaji setiap peluang dan ancaman bagi negerinya secara serius dan mendetail agar tetap hidup. Para pemimpin ini mengatur sebuah sistem politik yang efisien dengan mencegah munculnya oposisi yang kuat. Rakyat diminta untuk konsentrasi pada bidang ekonomi, bersaing diri melawan kompetisi global, meningkatkan kemampuan

profesionalisme, dan menyediakan jasa yang kompetitif bagi pasar bebas internasional.

Untuk soal *survive* dalam bidang pertahanan dan keamanan mereka juga tidak kernal kompromi. Sudah sejak lama strategi pertahanan Singapura misalnya dirancang untuk melawan musuh paling dekat yang mengancamnya. Dua tetangga Melayu mereka yakni Indonesia dan Malaysia tentu saja adalah bagian dalam pemikiran strategis ancaman terhadap negara itu. Mereka tidak segan-segan untuk memcontoh model Israel dalam merancang pertahanan ini, dan mempunyai hubungan dekat dengan negara itu. Tanpa menghiraukan keamanan tetangga yang mengesankan penduduk Israel di tanah Palestina, negeri itu suatu saat menerima kunjungan Presiden Israel ke Negara itu.

Negara ini memang bergabung dalam ASEAN, tetapi seperti semua negara ASEAN lainnya, mereka juga punya cita-cita dan kepentingan sendiri dalam bergabung dengan organisasi kawasan ini. Dalam ASEAN, eksistensinya walaupun sebagai sebuah negara kecil diakui sederajat dengan negara-negara yang lebih luas wilayah dan penduduknya. Mereka juga mempunyai kesempatan untuk mengajukan konsep mereka seperti kawasan dagang bebas untuk ASEAN yang jelas menguntungkan Singapura yang secara ekonomi lebih maju.

Singkatnya, kondisi-kondisi dan praktek politik di atas terus mengajarkan kepada negeri kecil seperti Singapura cara untuk *survive*. Mereka harus pandai memanfaatkan kesempatan yang ada

sekecil apapun, memusnahkan kemerdekaan, berdisiplin, mencontoh negeri lain yang sama dalam pemerintahan dan menunjukkan eksistensinya di kawasan. Bagi negara seperti Singapura, mewujudkan kepentingan dengan kekerasan senjata tentu saja bukan pilihan. Mereka tidak punya kemampuan untuk itu, mereka harus berdamai dengan lingkungan, satu-satunya pilihan yang tersedia adalah memanfaatkan setiap peluang sebaik mungkin, itu lah budaya strategik yang berkembang dan dipitih Singapura.

Dalam konteks seperti itu, perjanjian ekstradisi juga bagi Singapura harus dilihat dari aspek apa kepentingannya untuk negeri itu. Walaupun kontribusi secara pasti secara ekonomis dari hadirnya konglomerat asing di negeri itu belum diprediksi secara jelas, namun setidaknya negeri itu ditunggangi dengan datangnya para konglomerat yang menginvestasikan uang mereka di Singapura terutama di bidang perumahan yang mengangkat pasar rumah yang lemah (Burton 2005).

Jalau tidak ada tuntutan dan tekanan dari negara tetangga tentang perannya memulangkan para konglomerat itu, tentu mereka tidak merasa perlu terburu-buru untuk melarikan sesuatu. Apalagi para konglomerat itu umumnya adalah etnis Cina yang mudah mendapatkan tempat di masyarakat bisnis dan politik negeri Singapura itu.

3. Tuntutan Indonesia terhadap Perjanjian Ekstradisi

Satu hal perlu diingat bahwa Indonesia baru mulai secara garat dan serius

menuntut tuntutan agar dilakukan perundingan perjanjian ekstradisi pada beberapa bulan terakhir setelah terjadi perubahan pemerintahan ke Susilo Bambang Yudhoyono, walaupun secara tuntutan itu sudah ada sejak awal. Salah satu alasan mengapa sebelum ini tidak ada perundingan serius dengan Singapura kemungkinan besar adalah karena para konglomerat itu juga punya kaitan dengan para pejabat di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia juga tidak berhasil mengikat mereka selama mereka di Indonesia atau mereka sengaja dibiarkan untuk lolos demi melindungi tokoh-tokoh tertentu.

Hal ini misalnya terlihat dari komentar Singapura bahwa sebelumnya soal perjanjian ekstradisi adalah soal Indonesia sendiri. Pengamat hubungan internasional sebelum menjadi Menteri, Juwono Sudarsono pernah mengatakan Singapura enggan melakukan perjanjian ekstradisi karena persoalannya lebih banyak di Indonesia di mana waktu itu adanya keterlibatan aparat Indonesia sendiri dalam larinya para koruptor ke Singapura (Tempo Interaktif). Para aparat itu tidak mau semua kedok mereka tenggelap. Di sini nampak bahwa pihak Singapura adalah pihak yang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam meningsatkan komitmen pelaksanaan hukum dalam negeri untuk memudahkan proses ekstradisi nantinya.

Perundingan tentang ekstradisi baru serius dilakukan dua negara bila ada keherdakan kuat keduanya untuk berunding. Pemerintah Australia dan Indonesia misalnya serius memandangkan soal ekstradisi karena Australia sangat *concerna* dengan soal imigran yang terus

berdatangan lewat Indonesia dan mengancam negara itu. Indonesia juga berkepentingan untuk membantu Australia mengatasi soal ini.

Dibandingkan dengan perjanjian dengan Australia dan Hong Kong, nampaknya pada waktu itu urgensi perundingan ekstradisi antara Indonesia belum lah kuat. Himbauan moral bahwa Singapura dapat menjaga citranya sebagai pemerintahan yang bersih dan anti korupsi agaknya tidak cukup kuat, karena toh yang korupsi bukan para pengusaha Singapura. Dunia internasional juga tidak menganggap itu cacat besar karena para konglomerat itu datang atas keinginan sendiri dan mereka lolos dari jeratan sistem hukum negara tetangga yang masih lemah.

Kini agaknya kedua pihak mulai serius untuk memundingkan soal ekstradisi ini, karena kondisinya makin matang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah bertemu dengan PM Singapura Lee Hsien Liong untuk merintis proses perjanjian ekstradisi pada awal tahun ini. Beberapa perundingan lanjutan kemudian dilakukan. Proses untuk mencapai perjanjian mungkin berlangsung lama, namun ini merupakan langkah penting untuk mengatasi persoalan ekstradisi kedua negara.

4. Kesimpulan: Urgensi Perjanjian Ekstradisi

Ada tiga alasan yang agaknya membuat perjanjian ekstradisi menjadi mendesak dan menuntut persetujuan segera. Pertama, pemerintah Indonesia makin serius untuk memberantas korupsi dan agaknya ingin menutup

berbagai celah yang menyebabkan para koruptor lolos. Saat ini misalnya, ada beberapa koruptor yang kesulitan diadili karena lari ke Singapura, sebut lah misalnya Adrian Waworuntu, tersangkut kunci skandal BNI sebesar Rp1,7 triliun (US\$190 million). Kemudian Martin Pauline Lumowa, warga Belanda, kelahiran Indonesia yang juga dikejar kepolisian Indonesia berada di Singapura. Beberapa tersangka penyalahgunaan dana BI seperti Davina Nusa Wijaya, juga berada di Singapura. Beberapa pengusaha juga pergi ke Singapura menyusul krisis ekonomi tahun 1997 dengan meninggalkan hutang ke pemerintah. (*Asia Times*, 12 Nopember 2004). Interpol saja tidak cukup untuk bisa membawa mereka pulang, tetapi diperlukan perjanjian ekstradisi.

Kedua, pada pihak lain pemerintah Singapura pun mulai terbuka dan memberi peluang bagi perundingan perundingan berbagai aspek dalam ekstradisi. Mereka juga melibha kemungkinan untuk meminta ekstradisi para pelaku teror yang sangat ditakuti di negara itu. Walaupun tidak mendesak seperti dari pihak Indonesia, Singapura juga bisa menikmati hubungan yang lebih wajar dalam perdagangan yang selama ini menjadi kecamatan tetangganya sebagai negara yang hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri dalam berdagang dengan negara tetangga. Adanya perjanjian secara luas juga memberi jaminan bagi kerjasama terutama para investor Singapura yang masih ragu tentang kepastian hukum untuk berusaha.

Ketiga, perjanjian ekstradisi adalah bagian dari upaya lebih luas untuk

meningkatkan perdagangan bebas yang fair antara kedua negara. Selain soal peletarian koruptor ke Singapura, selama ini negara ditrogkan mlyaran rupiah oleh para penyelundup pasir, kayu, timah, ikan dll ke Singapura. Karena kegiatan ini volume degang yang resmi teridentifikasi sering berbeda antara catatan Indonesia dan Singapura. Penyelundupan orang dan obat bias yang makin marak juga akan dikkukan dalam visi perjanjian itu.

namun semua kehendak yang baik ini tentu harus didukung dengan perbaikan dan kesiapan dari pihak Indonesia. Selama ini Singapura banyak diuntungkan oleh keadaan aturan hukum yang tidak dilaksankan di Indonesia. Para penyelundup yang dilindungi oleh aparat mudah lolosnya para koruptor ke luar negeri menunjukkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Bila ini dilbeasahi tentu saja kasus-kasus peletarian

medul dan penyelundupan akan semakin berkurang.

Daftar Pustaka

- Burton, John, 2005, 'Singapore hopeful on Indonesia extradition treaty', *Financial Times*, February 15.
- England, Vaudine, 2000, 'Singapore Greets Wahid Ouburst with Silence', *South China Morning Post*, November 28.
- Guern, Bill, 2004, 'Singapore, Indonesia Meet, Greel And Run', *Asia Times*, November 13.
- Leifer, Michael, 2000, *Singapore's Foreign Policy: Coping with Vulnerability*, London, New York: Routledge.

Persyaratan Naskah untuk JSBP

1. Artikel merupakan / diangkat dari hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian (ada temuan) di bidang sosial, budaya dan politik.
2. Artikel ditulis dalam bidang bahasa Inggris / Indonesia maksimal 20 halaman kuarto spasi ganda, dilengkapi dengan abstrak (maksimum 100 kata) dan kata-kata kunci. Biodata singkat penulis dicantumkan sebagai catatan kaki pada halaman pertama naskah. Artikel juga dapat dikirim dalam disket dengan program MS Word atau program lain dalam format text.
3. Artikel (hasil penelitian) memuat :
Judul
Nama Penulis
Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
Kata-kata kunci
Pendahuluan (tanpa sub judul, memuat latar belakang masalah dan sedikit tinjauan pustaka, dan masalah / tujuan penelitian)
Metode
Hasil
Pembahasan
Kesimpulan dan Saran
4. Artikel (setara hasil penelitian) memuat :
Judul
Nama Penulis
Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
Kata-kata kunci
Pendahuluan (tanpa sub judul)
Sub Judul
Sub Judul
Sub Judul (sesuai kebutuhan)
Penutup (atau Kesimpulan dan Saran)
5. Artikel dikirim 2 (dua) eksemplar dan disketnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum bulan penerbitan kepada :
Jurnal Sosial-Budaya dan Politik
d.a. LKPM atau LKPK FISIP Universitas Jember
Jl. Kalimantan Kampus Tegal Boto Jember 68131
Telp. (0331) 335586 Fax: (0331) 331342
E-mail : jsbp@eudoramail.com

6. Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara lisan atau tertulis. Artikel yang tidak dimuat, tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.